

**BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN
MAKASSAR**

2025

CaLK

Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir
31 Desember 2025

Jl .Bandara Baru,
Bandar Udara Sultan Hasanuddin,
Makassar



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Pencegahan Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2025 Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar.

Makassar, Desember 2025
Kepala,

dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM
NIP. 196908221993031005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	5
Daftar Isi	6
Pernyataan Tanggung Jawab	7
Ringkasan	8
I. Laporan Realisasi Anggaran	8
II. Neraca	8
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	14
A. Penjelasan Umum	14
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	26
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	31
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	38
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	43
F. Pengungkapan Penting Lainnya	46
VI. Lampiran dan Daftar	47

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2025 Balai Besar Kekarantina Kesehatan Makassar terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Makassar, Makassar 2025
Kepala,

dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, MKM
NIP. 196908221993031005

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Semester II TA 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 6.479.240.195,- atau mencapai 149,6 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.4.329.142.000,-

Realisasi Belanja Negara hingga sem II TA 2025 adalah sebesar Rp.28.509.512.716,- Terdiri atas belanja pegawai: Rp.20.494.547.223,-; belanja barang : Rp.6.310.844.209,- dan belanja modal : Rp.1.704.121.284,- Realisasi belanja sepanjang semester II tahun 2025 mencapai 82.91% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 34.385.588.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas hingga 31 Desember 2025. Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp.42.520.895.531,- yang terdiri dari: Aset Lancar senilai Rp.2.420.572.049,- berupa Persediaan senilai Rp.2.420.572.049,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp.39.965.820.983,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.4.114.861.402,-. Pada sisi Passiva terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek senilai Rp.137.466.833,- terdiri atas: Utang Kepada Pihak Ketiga Rp.133.821.000;Pendapatan diterima dimuka Rp.3.645.833,- dan Ekuitas disajikan sebesar Rp.42.383.428.698,- sehingga Jumlah Kewajiban dan Ekuitas sebesar Rp.42.520.895.531,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.6.478.719.362,- sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.30.070.459.560,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp.23.591.740.198,-). Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa disajikan sebesar Rp.(0,-) dan Pos Luar Biasa sebesar Rp. 0,- sehingga pada semester II Tahun Anggaran 2025 diperoleh Defisit LO sebesar (Rp.23.591.740.198,-)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas pada tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun pelaporan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pada Semester I TA 2025 Laporan Ekuitas Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar disajikan sebagai berikut: Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp.40.605.067.897,-. Defisit LO sebesar (Rp.23.600.138.810,-). Koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas sebesar (Rp.16.878.001,-). Transaksi antar entitas senilai Rp.25.395.377.612,-terdiri atas : Ditagihkan Ke Entitas Lain Rp.28.509.512.716,- ; Diterima dari Entitas Lain (Rp.6.479.240.195,-); Transfer Masuk Rp.3.365.105.091,-, sehingga Kenaikan/Penurunan ekuitas diperoleh sebesar Rp.1.778.360.801,- sehingga Ekuitas Akhir entitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp.42.383.428.698,-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada Semester II tahun 2025

disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SEMESTER II
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2024

Tabel I. Laporan Realisasi Anggaran (Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	Sem I 2025		% thd Angg	Sem I Tahun 2024		% thd Angg
		ANGGARAN	REALISASI		Anggaran	REALISASI	
PENDAPATAN							
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	4.329.142.000	6.479.240.195	149,67	1.913.125.000	5.770.668.051	302
JUMLAH PENDAPATAN		4.329.142.000	6.479.240.195	149,67	1.913.125.000	5.770.668.051	302
BELANJA							
Belanja Pegawai	B.2	20.515.595.000	20.494.547.223	99,90	20.010.013.000	19.999.910.417	100
Belanja Barang	B.3	12.007.042.000	6.310.844.209	52,56	10.052.337.000	9.923.294.352	99
Belanja Modal	B.4	1.792.481.000	1.704.121.284	95,07	305.150.000	298.880.845	98
JUMLAH BELANJA		34.315.118.000	28.509.512.716	83,08	30.367.500.000	30.222.085.614	99,52

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR NERACA PER 31 Desember 2025 dan 2024

Tabel II. Neraca Per 31 Desember 2025
Rupiah)

(Dalam

URAIAN	CATATAN	31-Dec-25	2024	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-	-	
Belanja Dibayar Dimuka		-	-	-	
Persediaan	C.2	2.420.572.049	706.191.556	1.714.380.493	242,76%
Jumlah Aset Lancar		2.420.572.049	706.191.556	1.714.380.493	242,76%
ASET TETAP					
Tanah	C.3	18.083.526.373	18.083.526.373	-	-
Peralatan dan Mesin	C.4	34.436.782.629	31.879.479.345	2.557.303.284	8,02%
Gedung dan Bangunan	C.5	21.921.105.341	21.921.105.341	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.6	127.816.000	127.816.000	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.7	(34.603.409.360)	(32.086.097.151)	(2.517.312.209)	7,85%
Jumlah Aset Tetap		39.965.820.983	39.925.829.908	39.991.075	0,10%
ASET LAINNYA					
Dana Yang dibatasi Penggunaannya	C.8				
Aset Tidak Berwujud	C.9	133.135.000	-	-	
Aset Lain-Lain	C.10	-	-	-	
	C.11	4.114.861.402	4.114.861.402	-	0,00%
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.12	(4.113.493.903)	(4.107.173.004)	(6.320.899)	0,15%
Jumlah Aset Lainnya		134.502.499	7.688.398	126.814.101	1649,42%
JUMLAH ASET		42.520.895.531	40.639.709.862	1.881.185.669	4,63%
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang Pada Pihak Ketiga	C.11	133.821.000	31.516.965	102.304.035	3,25
Pendapatan Diterima Dimuka	C.13	3.645.833	3.125.000	520.833	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		137.466.833	34.641.965	102.824.868	296,82%
JUMLAH KEWAJIBAN		137.466.833	34.641.965	102.824.868	296,82%
EKUITAS					
Ekuitas	C.15	42.383.428.698	40.605.067.897	1.778.360.801	4,38%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		42.520.895.531	40.639.709.862	1.881.185.669	4,63%

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025

Tabel III. Laporan Operasional Per 31 Desember 2025 dan 2024 (Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-25	31-Dec-24	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	6.478.719.362	5.770.147.218	708.572.144	12,28%
JUMLAH PENDAPATAN		6.478.719.362	5.770.147.218	708.572.144	12,28%
BEBAN				-	0,00%
Beban Pegawai	D.2	20.494.547.223	19.998.650.417	495.896.806	2,48%
Beban Persediaan	D.3	1.388.517.965	3.460.684.428	(2.072.166.463)	-59,88%
Beban Barang dan Jasa	D.4	3.425.092.480	4.942.514.075	(1.517.421.595)	-30,70%
Beban Pemeliharaan	D.5	1.022.385.258	1.318.767.988	(296.382.730)	-22,47%
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.654.050.526	3.190.060.232	(1.536.009.706)	-48,15%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	2.085.866.108	2.682.495.939	(596.629.831)	-22,24%
Beban Penyisihan Piutang			-	-	0,00%
JUMLAH BEBAN		30.070.459.560	35.593.173.079	(5.522.713.519)	-15,52%
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(23.591.740.198)	(29.823.025.861)	6.231.285.663	-20,89%
KEGIATAN NON OPERASIONAL				-	0,00%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.9	-	-	-	0,00%
Beban Kerugian Pelepasan Aset	D.10	-	-	-	0,00%
<i>Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar</i>		-	-	-	0,00%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.11	-	-	-	0,00%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	D.12	-	-	-	0,00%
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Tahun anggaran yang lalu	D.13	-	-	-	0,00%
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	D.14	-	-	-	0,00%
<i>Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</i>		-	-	-	0,00%
<i>Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</i>				-	0,00%
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.15	8.398.612	-	8.398.612	0,00%
Beban Persediaan Rusak/Usang	D.16	-	-	-	
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA		(8.398.612)	-	(8.398.612)	0,00%
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		-	-	-	0,00%
				-	0,00%
SURPLUS/DEFISIT LO	D.11	(23.600.138.810)	(29.823.025.861)	6.222.887.051	-20,87%

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2025 DAN 2024

Tabel IV. Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-25	31-Dec-24	Kenaikan (Penurunan)	
				Jumlah	%
EKUITAS AWAL	E.1	40.605.067.897	43.266.495.315	(2.661.427.418)	-6,15%
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(23.600.138.810)	(29.823.025.861)	6.222.887.051	-20,87%
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		(16.878.001)	(73.355.965)	56.477.964	-76,99%
Koreksi atas Reklasifikasi	E.3	-	2.314.286		0,00%
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.4	-			
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.5	(16.878.001)	(75.670.251)		
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.3	25.395.377.612	27.234.954.408	(1.839.576.796)	-6,75%
Ditagihkan Ke entitas Lain	E.3.1	28.509.512.716	30.222.085.614	(1.712.572.898)	-5,67%
Diterima dari Entitas Lain	E.3.2	(6.479.240.195)	(5.770.668.051)	(708.572.144)	12,28%
Transfer Keluar		-	-	-	0,00%
Transfer Masuk	E.3.3	3.365.105.091	2.635.569.127	729.535.964	0,00%
Pengesahan Hibah Langsung	E.3.4	-	147.967.718	(147.967.718)	0,00%
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.4	1.778.360.801	(2.661.427.418)	4.439.788.219	0,00%
EKUITAS AKHIR	E.5	42.383.428.698	40.605.067.897	1.778.360.801	4,38%

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Balai Besar

Kekarantinaan Kesehatan Makassar

Dasar Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang
Hukum berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur
Entitas dan Jenderal Pencegahan Penyakit Kementerian Kesehatan.
Rencana Organisasi dan tata kerja entitas diatur dalam Peraturan
Strategis Menteri Kesehatan RI No. 356/MENKES/PER/IV/2008 Jo Permenkes Nomor 2348/MENKES/PER/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, disebutkan bahwa KKP terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Pengendalian Karantina dan Surveilans Epidemiologi, Bidang Pengendalian Resiko Lingkungan, Bidang Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah, Wilayah Kerja, Kelompok Fungsional dan Instalasi.

Wilayah Kewenangan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar (BBKK Makassar) terdiri dari Induk di Bandara Sutan Hasanuddin dan 9 (sembilan) wilayah kerja yang tersebar di 2 (Dua) Provinsi yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Wilker yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari Pelabuhan Internasional Soekarno Hatta, Pelabuhan Khusus Biringkassi, Pelabuhan Pare-Pare, Pelabuhan Awerange, Pelabuhan Bajo'E, Pelabuhan Palopo, dan Pelabuhan Malili. Wilayah Kerja di Provinsi Sulawesi Barat yaitu Pelabuhan Belangbelang dan Bandara Tampapadang.

Entitas berkedudukan di Jalan Bandara Baru, Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar.

Tugas Pokok Dan Fungsi

1. Tugas Pokok.

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar mempunyai tugas pokok pencegahan masuk dan

keluarnya penyakit menular, penyakit potensial wabah, pengamanan terhadap penyakit yang muncul kembali, survailans epidemiologi, kekarantinaaan, pengawasan OMKABA, pelayanan kesehatan, pengendalian dampak kesehatan lingkungan, bioterorisme, unsur biologi, kimia dan pengamanan radiasi di wilayah kerja bandara dan lintas batas darat negara.

2. Fungsi

- a. Pelaksanaan kekarantinaaan
- b. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan
- c. Pelaksanaan pengendalian resiko lingkungan di bandara, pelabuhan dan lintas batas darat negara
- d. Pelaksanaan pengamatan penyakit, penyakit potesial wabah, penyakit baru, dan penyakit yang muncul kembali
- e. Pelaksanaan pengamanan radiasi pengion dan non pengion, biologi dan kimia
- f. Pelasanaan sentra/simpul jejaring survailans epidemiologi sesuai penyakit yang berkaitan dengan lalu lintas nasional, regional dan Internasional
- g. Pelaksanaan fasilitas dan advokasi kesiapsiagaan dan penanggulangan KLB dan bencana bidang kesehatan, serta kesehatan matra termasuk penyelenggaraan kesehatan haji dan perpindahan penduduk
- h. Pelaksanaan fasilitas dan advokasi kesehatan kerja di lingkungan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
- i. Pelaksanaan pemberian sertifikat kesehatan OMKABA export dan mengawasi persyaratan dokumen kesehatan OMKABA import
- j. Pelaksanaan Pengawasan kesehatan alat angkut dan muatannya

- k. Pelaksanaan pemberian pelayanan kesehatan di wilayah kerja bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
- l. Pelaksanaan jejaring informasi dan teknologi bidang kesehatan di bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
- m. Pelaksanaan jejaring kerja dan kemitraan bidang kesehatan di bandara
- n. Pelaksanaan kajian kekarantinaan, pengendalian resiko lingkungan, dan survailans keshatan pelabuhan
- o. Pelaksanaan pelatihan teknis bidang kesehatan bandara, pelabuhan, dan lintas batas darat negara
- p. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggan KKP.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar berkomitmen dengan visi ***“Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar yang Tangguh dan Prima dalam Cegah Tangkal Faktor Resiko untuk Mewujudkan Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Berkeadilan di Pintu Gerbang Negara”***

Untuk terciptanya Visi tersebut dirumuskan misi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar, antara lain :

- a. Melindungi kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan dan Bandara melalui pelaksanaan cegah tangkal penyakit Karantina, penyakit menular dan PHEIC
- b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan dan bandara melalui pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani
- c. Mencegah timbulnya penyakit melalui penyelenggaraan pengendalian resiko lingkungan

- d. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengendalian dan pencegahan penyakit di wilayah kerja BBKK Makassar.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh

transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II 2025 Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas

pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang

menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5)Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah

perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel V: Tabel Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan

dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai

dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat

Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel VI. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel VII. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN
REALISASI ANGGARAN**

Dalam periode Semester II Tahun 2025 Balai Besar
Kekarantinaan Kesehatan Makassar telah merevisi
sebanyak (tiga) kali Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) dari DIPA awal.

*Realisasi
Pendapatan
Rp.6.479.240.
195.-*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada
31 Desember 2025 adalah sebesar Rp. 6.479.240.195,-
atau mencapai 149.6 persen dari estimasi pendapatan
yang ditetapkan sebesar Rp.4.329.142.000,-.
Pendapatan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan
Makassar terdiri dari:

- 1. Jasa Layanan Fasilitas Kesehatan Rp.285.830.000,-
- 2. Jasa Karantina Kesehatan sebesar
Rp.1.267.320.000,-
- 3. Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan sebesar
Rp. 4.918.020.000,-

*Tabel VIII
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Tahun 2025*

AKUN	Uraian	31 Des 2025			31 Des 2025		
		Anggaran	Realisasi	% Real Angg.	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan bangunan	-	6.250.000		-	6.250.000	
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	191.540.000	285.830.000	149,23	43.035.000	372.615.000	8,66
425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	799.120.000	1.267.320.000	158,59	1.571.590.000	1.242.630.000	0,79
425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	3.331.720.000	4.918.020.000	147,61	298.500.000	4.143.345.000	13,88
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	1.820.195	-	-	5.828.051	-
Jumlah		4.322.380.000	6.479.240.195	150	1.913.125.000	5.770.668.051	301,64

Realisasi Pendapatan pada sem.II TA 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada TA 2024 yakni sebesar 150 %, Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan pelayanan vaksin Meningitis Jemaah Umroh akibat diwajibkannya vaksin meningitis bagi Jemaah umroh oleh pemerintah Arab Saudi serta meningkatnya layanan di klinik yang telah bekerjasama dengan BBKK Makassar dalam hal memberikan vaksin internasional.

Realisasi

Belanja Negara
Rp.28.509.512.716,-

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada semester II TA 2025 adalah sebesar Rp.28.509.512.716,- atau 82.91% dari anggaran belanja sebesar Rp.34.385.588.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada sem II TA 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel IX Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester II TA 2025

Uraian	Semester II (31 Des 2025)			Semester II (31 Des 2024)		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	20.515.595.000	20.494.547.223	99,90%	20.010.013.000	19.999.910.417	99,95%
Belanja Barang	12.077.512.000	6.310.844.209	52,25%	10.052.337.000	9.923.294.352	98,72%
Belanja Modal	1.792.481.000	1.704.121.284	95,07%	305.150.000	298.880.845	97,95%
Jumlah	34.385.588.000	28.509.512.716	82,91%	30.367.500.000	30.222.085.614	99,52%

Prosentase Realisasi Belanja pada semester II TA 2025 mengalami penurunan sebesar 16.61% dibandingkan realisasi belanja pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh penurunan belanja barang hingga 46% pada periode semester II 2025.

*Belanja
Pegawai
Rp.20.494.547.
223 ,-*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada semester II TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.20.494.547.223,- dan Rp.19.999.910.417,- . Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai pada sem II TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 5 persen dibandingkan pada periode yang sama pada TA 2024, hal ini disebabkan oleh adanya pegawai yang beralih ke jenjang jabatan fungsional tertentu serta kenaikan gaji berkala pegawai.

*Belanja
Barang
Rp.6.310.844.2
09,-*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang pada semester II TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.310.844.209,- dan Rp.9.923.294.352,-. Realisasi Belanja Barang pada TA 2024 mengalami penurunan sebesar 46% dibandingkan realisasi Belanja Barang pada periode yang sama di tahun 2024. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran pada tahun 2025.

Belanja Modal **B.5 Belanja Modal**

Rp.1.704.121.284,-

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.1.704.121.284,- dan Rp.298.880.845,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal pada semester II tahun 2025 adalah berupa belanja modal peralatan dan mesin. Uraian mengenai belanja modal ini akan ungkapkan pada penjelasan atas pos-pos neraca pada belanja aset peralatan dan mesin.

B.6. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar pada pperiode Juni 2025 adalah 99.16 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel XI. Rincian Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Semester II 2025

NO	Uraian	Nilai
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi Hal III DIPA	14,16
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP/TUP	10
7	Capaian Output	25
Total Nilai		99,16

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas Di Bendahara Pegeluaan Rp.0,-

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara adalah sejumlah uang tunai TUP/GUP dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran yang akan digunakan sebagai operasional dan mendukung kegiatan perkantoran. Kas di bendahara pengeluarab per 30 Juni 2025 sebesar Rp.0,-

Persediaan Rp.2.420.572.049,-

C.2. Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.420.572.049,-

dan Rp.706.191.556,-. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan pada Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar diperoleh dari Belanja Rutin.

*Tabel XIII. Rincian Persediaan
per 31 Desember 2025 dan 2024*

Jenis	Jenis	2025	2024
117111	Barang Konsumsi	661.247.455	379.944.164
117113	Barang untuk Pemeliharaan	-	2.264.750
117131	Bahan Baku	-	-
117199	Persediaan Lainnya	1.759.324.594	323.982.642
Jumlah		2.420.572.049	706.191.556

Persediaan pada akhir tahun 2025 dalam kondisi baik.

Tanah

Rp.18.083.526
.373,-.

C.3. Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.18.083.526.373,-. Penambahan nilai tanah senilai Rp.147.967.718,-. Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel XIV. Rincian Tanah Per 31 Desember 2025

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	120	Tanah Rumah dinas Parepare	86.904.000
2	204	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	1.794.189.000
3	12.160	Tanah Wilker Bandara Tamba Padang Mamuju - Sulawesi Barat	388.500.000
4	4.000	Tanah Kantor Induk	8.942.400.000
5	1.230	Tanah Bangunan Kantor Parepare	1.321.943.000
6	1.360	Tanah Bangunan Wilker Bajoe	1.242.496.000
7	2.531	Tanah Bangunan Wilker Palopo	2.405.343.000
8	999	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	634.941.525
9	1.200	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (Wilker Pasangkayu)	147.967.718
10	800	Tanah Wilker Awerange	797.429.630
11	1.000	Tanah Wilker Bira	321.412.500
Jumlah			18.083.526.373

Peralatan dan C.4. Peralatan dan Mesin

Mesin
Rp.34.436.782.629,-

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp. 34.436.782.629,- dan Rp.31.879.479.345,-. Penambahan belanja modal Peralatan dan Mesin sebesar 8.02% diperoleh dari belanja modal BBKK Makassar selama Tahun 2025, berupa:

Daftar Pembelian dan Transfer Masuk
Peralatan dan Mesin Tahun 2025

NO	Nama Barang	Jumlah (Unit)	Harga/Unit	Total Harga
I. Pembelian				
1	Nebulizer	2	1.399.000,00	2.798.000,00
2	Nebulizer	1	1.398.000,00	1.398.000,00
3	Suction Pump	1	2.830.500,00	2.830.500,00
4	Microwave Oven	1	2.109.000,00	2.109.000,00
5	Water Analysis Kit	2	76.110.000,00	152.220.000,00
6	Digital Anemometer	4	4.440.000,00	17.760.000,00
7	Incubator	1	12.654.000,00	12.654.000,00
8	Scooter Listrik	1	5.439.000,00	5.439.000,00
9	Scooter Listrik	1	5.439.001,00	5.439.001,00
10	AED	4	46.055.499,50	184.221.998,00
11	Board Stand	3	2.000.000,00	6.000.000,00
12	EKG	2	48.855.646,50	97.711.293,00
13	Tablet PC	8	9.599.924,88	76.799.399,00
14	Hepafilter	6	17.187.843,00	103.127.058,00
15	Hepafilter	1	17.187.849,00	17.187.849,00
16	Central Oxygen	2	23.698.500,00	47.397.000,00
17	Lemari penyimpanan	1	19.258.500,00	19.258.500,00
18	Lemari Kayu	1	14.596.500,00	14.596.500,00
19	Alat Pengolah Air	1	25.363.500,00	25.363.500,00
20	Tabung O2	5	2.500.000,00	12.500.000,00
21	Bed Pasien	4	2.500.000,00	10.000.000,00
22	Tool Kit Set	1	2.109.000,00	2.109.000,00
23	Alat Laboratorium Lingkungan	17	2.770.588,24	47.100.000,00
24	Sprayer	2	6.016.200,00	12.032.400,00
25	Stetoscope	12	1.184.000,00	14.208.000,00
26	Refractometer	6	5.106.000,00	30.636.000,00
27	Pulse Oxymeter	7	1.260.642,86	8.824.500,00
28	Test Kit	2	2.975.355,00	5.950.710,00
29	Personal Computer	11	18.870.000,00	207.570.000,00
30	Laptop	24	15.077.500,00	361.860.000,00
31	Timbangan Badan	2	1.359.750,00	2.719.500,00
32	Scanner	3	6.675.725,00	20.027.175,00
33	Printer Passport	4	11.610.000,00	46.440.000,00
34	Printer Passport	1	11.610.001,00	11.610.001,00
35	Printer	15	3.197.812,00	47.967.180,00
36	Printer	1	3.197.820,00	3.197.820,00
37	UPS	1	1.598.400,00	1.598.400,00
41	Emergency Kit	4	8.900.000,00	35.600.000,00
42	Elektronik Termometer	16	1.172.500,00	18.760.000,00
43	Lemari Dispay	2	1.700.000,00	3.400.000,00
44	Tabung O2	2	2.850.000,00	5.700.000,00
Total				1.704.121.284,00
II. Transfer Masuk				
1	Matras	1	698.500,00	698.500,00
2	Matras	31	698.500,00	21.653.500,00
3	Polymerase Chain Reactor	1	830.830.000,00	830.830.000,00
Total				853.182.000,00

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo awal Nilai Perolehan per 31 Desember 2024	31.879.479.345
Mutasi tambah:	
Pembelian	1.720.999.285
Reklas aset lainnya ke aset tetap	0
Transfer Masuk	853.182.000
Mutasi kurang:	
Penghapusan Aset	0
Reklas aset Tetap ke Gedung dan Bangunan	0
Koreksi Nilai Aset	-16.878.001
Saldo per 31 Desember 2025	34.436.782.629
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-29.809.939.651

Gedung dan Bangunan
Rp.21.921.105.341

C.5. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp. 21.921.105.341,- . Tidak ada penambahan maupun pengurangan saldo Gedung dan bangunan pada tahun 2025

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp.127.816.000,-

C.6. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.127.816.000,-. Tidak terjadi kenaikan/penurunan dikarenakan tidak ada transaksi pembelian maupun penghapusan pada periode tersebut.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(Rp.34.603.409.360,-)

C.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp.34.603.409.360,-) dan (Rp.32.086.097.151,-). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel XVI. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Semester II. TA 2025

No	Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2025	Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2024	Naik/Turun (%)
1	Peralatan dan Mesin	29.809.939.651	27.754.019.932	1,07
2	Gedung dan Bangunan	4.687.847.459	4.227.292.469	1,11
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	105.622.250	104.784.750	1,01
Akumulasi Penyusutan		34.603.409.360	32.086.097.151	1,08

Aset Tak
Berwujud Rp.
0,-

C.8. Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.0,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Besar Kekarantinaan Makassar berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Aset Lain-lain
Rp.4.114.861.
402,-

C.9. Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.4.114.861.402,-. Tidak ada perubahan nilai Aset lain-lain pada tahun 2025. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Akumulasi
Penyusutan
Dan
Amortisasi
Aset Lainnya
(Rp.4.112.093.
903,-)

C.10. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp.4.112.974.734,-). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel XVIII. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 30 Juni 2025

Aset LAINNYA	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi
Aset Tak Berwujud	1.400.000	1.400.000
Aset Lain-lain	4.112.093.903	4.111.574.734
Jumlah	4.113.493.903	4.112.974.734

Amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Utang kepada Pihak Ketiga Rp. 133.821.000,-

C.11. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga pada akhir tahun 2025 tercatat sebesar Rp. 133.821.000,- terdiri atas :

- 1. Belanja Jasa Lainnya yang masih harus dibayar sebesar Rp. 133.135.000,- adalah belanja upah tenaga outsourcing hingga 31 Desember 2025 yang telah dibayarkan di Bulan Januari 2026.
- 2. Belanja barang yang masih harus dibayar sebesar : Rp. 686.000,- merupakan pembayaran air PDAM bulan desember 2024 yang dibayarkan di januari 2026

Belanja pegawai yang masih harus dibayar dan belanja barang yang masih harus dibayar adalah belanja gaji dan tunjangan pegawai bulan juli 2025.

Pendapatan diterima dimuka Rp.3.645.833,-

C.12. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan yang diterima dimuka sebesar Rp. 3.645.833,- adalah pendapatan atas sewa Gedung dan bangunan oleh koperasi pegawai Arwana sebesar Rp.6.250.000,- selama setahun dimulai pada bulan

Juli 2025 hingga Juli 2026

*Ekuitas Rp.
42.383.428.698,-*

C.13. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.42.383.428.698 dan Rp. 40.605.067.897, penjelasan mengenai ekuitas akan dijabarkan lebih lanjut pada pembahasan Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan Operasional Rp.
6.478.719.362,-*

D.1 Pendapatan Operasional

Jumlah Pendapatan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2026 dan 2025 adalah sebesar Rp.6.478.719.362,- dan Rp.5.770.147.218,-. Adapun rincian pendapatan operasional pada tahun 2025 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel XIX.

Rincian Pendapatan Operasional Per 30 Juni 2025

AKUN	URAIAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	NAIK (TURUN) %
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.729.167	5.729.167	100,00%
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	285.830.000	372.615.000	76,71%
425314	Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	1.267.320.000	1.242.630.000	101,99%
425315	Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	4.918.020.000	4.143.345.000	118,70%
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.820.195	5.828.051	
Jumlah		6.478.719.362	5.770.147.218	112,28%

Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya meningkat hingga 112.28% hal ini disebabkan oleh diwajibkannya kembali Jemaah umroh untuk vaksin meningitis dan bertambahnya kerjasama dengan klinik penyelenggara vaksin meningitis.

Beban
Pegawai
Rp.20.494.547.
223,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.20.494.547.223,- dan Rp.19.998.650.417,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel XX. Rincian Beban Pegawai
Semester II TA 2025 dan 2024

URAIAN		Sem II 2025	Sem II 2024	NAIK (TURUN) %
511111	Beban Gaji Pokok PNS	6.867.550.400,	6.809.891.500,	9916,04%
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	-44,	-3.750,	852272,73%
511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	89.441,	97.327,	10881,70%
511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	441.571.820,	442.684.500,	10025,20%
511122	Beban Tunj. Anak PNS	161.444.184,	160.020.768,	9911,83%
511123	Beban Tunj. Struktural PNS	37.135.000,	34.830.000,	9379,29%
511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	807.907.000,	760.135.000,	9408,69%
511125	Beban Tunj. PPh PNS	71.809.288,	69.930.631,	9738,38%
511126	Beban Tunj. Beras PNS	351.309.420,	355.002.840,	10105,13%
511129	Beban Uang Makan PNS	927.768.000,	864.367.000,	9316,63%
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	40.125.000,	53.850.000,	13420,56%
511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	-370.000,	234.685.400,	-6342848,65%
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	314.699.539,	4.730,	0,15%
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	5.367,	10.200.220,	19005440,66%
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	13.651.810,	267.128,	195,67%
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	1.781.288,	21.120.000,	118565,89%
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	31.266.666,	8.400.720,	2686,80%
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	12.697.640,	43.803.000,	34496,96%
511628	Beban Uang Makan PPPK	58.127.000,	186.246.000,	32041,22%
512211	Beban Uang Lembur	154.125.000,	6.894.000,	447,30%
512212	Beban Uang Lembur PPPK	5.503.000,	9.666.815.689,	17566446,83%
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	9.779.311.954,	269.407.714,	275,49%
512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	417.038.450,		
Jumlah		20.494.547.223	19.998.650.417	12,86%

Beban Pegawai mengalami kenaikan sebesar 12.86%, hal ini disebabkan oleh adanya peralihan pegawai ke fungsional tertentu dari fungsional umum serta kenaikan gaji berkala pegawai.

Beban
Persediaan
Rp.1.388.517.
965,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada semester I Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.1.388.517.965,- dan Rp.3.460.684.428,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan pada semester II Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel XXI. Rincian Beban Persediaan
Semester I TA 2025 dan 2024

URAIAN	Sem II TH 2025	Sem II TH 2024	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	376.418.782	1.363.342.528	-72,39%
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	#DIV/0!
Beban Persediaan Lainnya	1.012.099.183	2.097.341.900	-51,74%
Jumlah	1.388.517.965	3.460.684.428	-59,88%

Beban Persediaan pada semester II 2025 mengalami penurunan sebesar 59.88% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya belanja dan penggunaan persediaan konsumsi dan persediaan lainnya dalam rangka mendukung operasional kantor yang diakibatkan oleh efisiensi anggaran selama tahun 2025.

Beban Barang dan Jasa
Rp.3.425.092.480,-

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada semester II Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.3.425.092.480,- dan Rp.4.942.514.075,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa pada semester II Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel XXII. Rincian Beban Barang dan Jasa
Semester II TA 2025 dan 2024

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	Sem I TH 2025	Sem I TH 2024	Jumlah	NAIK (TURUN) %
521111	Beban Keperluan Perkantoran	315.966.896,	434.859.232,	-118.892.336	-27,34%
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	192.000,	30.000,	162.000	0,00%
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	182.486.000,	238.936.000,	-56.450.000	-23,63%
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	195.256.180,	185.039.000,		
521211	Beban Bahan	118.990.645,	881.844.956,	-762.854.311	-87%
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	14.439.000,	222.360.974,		
521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0,	8.723.000,	-8.723.000	0,00%
522111	Beban Langganan Listrik	396.194.597,	520.579.942,	-124.385.345	-23,89%
522112	Beban Langganan Telepon	8.547.229,	6.222.308,	2.324.921	37,36%
522113	Beban Langganan Air	6.783.300,	8.751.820,	-1.968.520	0,00%
522141	Beban Sewa	348.163.319,	397.865.013,	-49.701.694	-12,49%
522151	Beban Jasa Profesi	16.200.000,	8.000.000,	8.200.000	102,50%
522191	Beban Jasa Lainnya	1.821.873.314,	2.029.301.830,	-207.428.516	-10,22%
Jumlah		3.425.092.480	4.942.514.075	-1.517.421.595	-30,70%

Beban Barang dan Jasa mengalami penurunan sebesar 30.70%, hal ini disebabkan oleh menurunnya beban langganan listrik dikarenakan adanya efisiensi anggaran dan penggunaan listrik kantor.

Beban Pemeliharaan
Rp.1.022.385.258,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan semester II Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.1.022.385.258,- dan Rp.1.318.767.988,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan

karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian beban pemeliharaan pada sem II tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel XXIII. Rincian Beban Pemeliharaan Semester II TA 2025 dan 2024

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	Sem II.TH 2025	Sem II TH. 2024	Jumlah	NAIK (TURUN) %
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	478.308.321,	763.635.081,	-285.326.760	-37,36%
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	537.779.056,	506.186.260,	31.592.796	6,24%
523129	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0,	0,		
593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	6.297.881,	44.446.117,	-38.148.236	-85,83%
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan		4.500.530,		
Jumlah		1.022.385.258	1.318.767.988	-296.382.730	-22,47%

Beban pemeliharaan selama periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 22.47% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh menurunnya beban pemeliharaan gedung dan bangunan serta beban persediaan bahan untuk pemeliharaan kantor. Hal ini dikarenakan telah tersedianya beberapa barang pada periode yang lalu.

Beban
Perjalanan
Dinas
Rp.1.654.050.
526,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada semester II Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.1.654.050.526,- dan Rp.3.190.060.232,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester II untuk TA 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel XXIV. Rincian Beban Perjalanan Dinas Semseter II TA 2025 dan 2024

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	Sem II TH 2025	Sem II TH 2024	Jumlah	NAIK (TURUN) %
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.262.343.526,	1.205.293.272,		0,00
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	391.707.000,	1.978.407.000,	-1.586.700.000	-80,20%
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0,	0	#DIV/0!
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	6.359.960,		
	Jumlah	1.654.050.526	3.190.060.232	-1.536.009.706	-48,15%

Beban perjalanan dinas mengalami penurunan sebesar 45,10% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya anggaran perjalanan dinas dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di wilker Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar.

Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp.2.085.866.
108,-

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi semester II Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.2.085.866.108,- dan Rp.2.682.495.939,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi semester I tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel XXV. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Semester II TA 2025 dan 2024

AKUN	URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	Sem II 2025	Sem II 2024	Jumlah	NAIK (TURUN) %
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.618.152.719,	2.204.784.179,	(586.631.460)	-26,61%
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	460.554.990,	460.554.990,	-	0,00%
591313	Beban Penyusutan Jaringan	837.500,	5.553.300,	(4.715.800)	-84,92%
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Kantor	6.320.899,	11.603.470,	(5.282.571)	-45,53%
	Jumlah Penyusutan	2.085.866.108	2.682.495.939	(596.629.831)	-22,24%

Beban penyusutan dan amortisasi pada semester II

mengalami penurunan sebesar 22.24%, hal ini disebabkan oleh berkurangnya asset peralatan dan mesin dan Jaringan diakibatkan rusak berat dan tidak dipergunakan lagi dalam operasional kantor serta telah dialihkan menjadi asset lain-lain untuk selanjutnya akan dilakukan lelang penghapusan.

*Pendapatan
Dari Penjualan
Peralatan dan
Mesin Rp.0,-

Beban

Kerugian
Pelepasan
Aset Rp.0,-*

D.8. Pendapatan Dari Penjualan Peralatan dan Mesin

Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin pada semester I tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp.0,-.

D.9. Beban Kerugian Pelepasan Aset

Beban Penyesuaian Nilai Persediaan pada semester I tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-.

*Surplus
(Defisit) Dari
Kegiatan Non
Operasional
(Rp.8.398.612,-)*

D.10. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional pada sem II TA 2025 dan 2024 mengalami defisit sebesar (Rp.8.398.612,-) dan Rp.0,- Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional adalah merupakan selisih dari Pendapatan Non Operasional dengan Beban Non Operasional.

*Surplus/
(Defisit) LO
(Rp.23.600.138.810,-)*

D.11. Surplus/Defisit LO

Pada semester II TA 2025 dan 2024 Balai Besar Kekarantina Kesehatan Makassar mengalami defisit LO, masing-masing sebesar (Rp.23.600.138.810,-) dan (Rp.29.823.025.861,-) adalah merupakan selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO pada semester I tahun 2025.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp.40.605.067
.897,-)*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada semester II Tahun 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.40.605.067.897,- dan Rp.43.266.495.315,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan.

*Defisit LO
(Rp.23.600.138.8
10,-)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar (Rp.23.600.138.810,-) dan (Rp.29.823.025.861,-) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa

*Koreksi Nilai
Aset Non
Revaluasi
(Rp.16.878.00
1)*

E.3. Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi nilai Aset Non Revaluasi pada tahun 2025 dan 2024 adalah (Rp.16.878.001,-) dan (Rp.75.670.251,-) adalah Void BAST atas pembelian asset scooter listrik sebanyak 2 unit.

*Transaksi
antas entitas
Rp.25.395.377
.612,-)*

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai transaksi antar entitas pada tahun 2025 dan 2024 adalah Rp. 25.395.377.612,- dan Rp.27.234.954.408,- transaksi adalah transaksi antar pemerintah pusat dan daerah dalam hal pemenuhan kebutuhan barang persediaan dan peralatan dan mesin selama tahun 2025.

*Ekuitas akhir
Rp.42.383.428
.696,-)*

E.5. Ekuitas Akhir

Ekuitas akhir pada tahun 2025 dan 2024 adalah Rp. 42.383.428.696,- dan Rp.40.605.067.897,- merupakan selisih antara ekuitas awal, surplus/defisit LO dengan transaksi antar entitas pada tahun buku. Laporan perubahan ekuitas menggambarkan nilai ekuitas entitas pada akhir tahun 2025.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Struktur Organisasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Makassar

Struktur organisasi dan tata kerja BBKK Makassar mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 Tahun 2023 tanggal 20 Februari 2023. Struktur organisasi BBKK Makassar terdiri atas :

1. Kepala Balai
2. Sub Bagian Administrasi dan Umum
3. Wilayah Kerja
4. Kelompok Jabatan Fungsional
5. Instalasi.

Uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Sub Bagian Administrasi dan Umum
 - a. Melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelaaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaandata dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kersipan, persuratan, dan kerumahtanggaan.
2. Instalasi
 - a. Unit pelayanan non struktural yang bertanggung jawab kepada Kepala BBKK Makasssar
 - b. Dipimpin oleh kepala instalasi, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BBKK Makassar

- c. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional yang sesuai dengan tugas dan fungsi instalasi
3. Wilayah Kerja
- a. Memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BBKK Makassar sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan
 - b. Dipimpin oleh kepala wilayah yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala BBKK Makassar
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional
4. Kelompok Jabatan Fungsional
- a. Dalam pelaksanaan tugas kelompok fungsional ditetapkan Ketua Tim Kerja
 - b. Ketua Tim Kerja mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
 - d. Jumlah jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasarkan atas analisis beban kerja
 - e. Tugas, jenis, dan jenjang kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan